

**HUBUNGAN PERAN KOMITE SEKOLAH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN MUTU SEKOLAH
di YAYASAN NURUL HUDA LAMPUNG**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Manajemen Pendidikan Islam



Oleh :

**NOVIANTI
NPM. 1786131037**

**PROGRAM MAGISTER
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM**

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**HUBUNGAN PERAN KOMITE SEKOLAH DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DENGAN MUTU SEKOLAH di YAYASAN
NURUL HUDA LAMPUNG**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Manajemen Pendidikan Islam

Oleh :

NOVIANTI
NPM. 1786131037

**PROGRAM MAGISTER
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM**

Pembimbing I : Dr. Hj. Eti Hadiati, M.Pd
Pembimbing II: Dr. Syafrimen, M.E.d

PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2020 M

HUBUNGAN PERAN KOMITE SEKOLAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN MUTU SEKOLAH DI YAYASAN NURUL HUDA LAMPUNG

ABSTRAK

Peran Komite Sekolah, Masyarakat dan mutu sekolah merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan, karena salah satu prinsip yang ada dalam MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) yaitu adanya peran komite sekolah dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah. Perubahan paradigma dari sentralisasi ke desentralisasi menuntut masyarakat lebih berperan aktif dalam mengembangkan program sekolah yang akhirnya berimbas pada mutu sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan 1. Hubungan Peran Komite sekolah dengan mutu sekolah, 2 Hubungan partisipasi masyarakat dengan mutu sekolah, 3. Hubungan positif secara simultan dari peran komite sekolah dan partisipasi masyarakat dengan mutu sekolah di Yayasan Nurul Huda Lampung.

Adapun penelitian yang digunakan adalah *Penelitian Kuantitatif Korelasional*, yaitu suatu pendekatan umum untuk penelitian yang berfokus pada penaksiran kovarians antar variabel, uji statistik untuk menentukan tendensi atau pola dari dua variabel atau lebih atau dua set data yang bervariasi secara konsisten. Data dari masing-masing variabel dikumpulkan secara terpisah melalui mengisi kuesioner yang disusun. Sampel pada penelitian ini adalah 98 tenaga pendidik (guru) di Yayasan Nurul Huda Lampung 98 tenaga pendidik dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari guru SMA 34 (34,3%) guru SMK, 22 (22,2%) guru SMP 27 (27,2%) dan 16 (16,3%) Guru SD.

Analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi linear sederhana dan regresi berganda, yang sebelumnya telah dilakukan uji normalitas linearitas dan homogenitas. Setelah dilaksanakan penelitian dan melaksanakan prosedur yang telah tersusun maka didapat hasil bahwa 1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara Peran Komite Sekolah dengan mutu sekolah sebesar 26,2% mengandung arti bahwa semakin baik peran komite sekolah maka akan semakin baik pula mutu sekolah. 2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara Partisipasi masyarakat dengan Mutu sekolah 8,3% mengandung arti bahwa partisipasi masyarakat bila diberdayakan dengan baik maka akan meningkatkan mutu sekolah 3. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara Peran Komite Sekolah dan Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama terhadap Mutu Sekolah sebesar 38,1%. Hal ini mengandung arti bahwa semakin baik peran komite sekolah dan partisipasi masyarakat di lingkungan sekolah maka semakin baik pula mutu sekolah.

Kata kunci: peran komite sekolah, partisipasi masyarakat, mutu sekolah

MOTTO

Di saat kita mendapat kebaikan yang melimpah dari Allah. Bersyukurlah janganlah merasa sombong dan merasa disayang Allah. Lalu di saat Allah memberikan musibah janganlah berburuk sangka padaNya. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al Baqarah: 216,

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui."



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Alloh SWT, tesis ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Drs.H. Djamiludin, H.S dan Ibundaku Hj.Nurhayati atas segala doa dan dukungannya dari awal memasuki jenjang kuliah samapi menyelesaikan tesis ini.
2. Suamiku H.Chorul Saleh, M.Pd dan anakku Fiantika Choirunnisa yang selalu memberikan dukungan baik moril dan materiil, terima kasih untuk segala cinta dan kasih sayang kalian.
3. Adik-adikku H. Meiyensi, M.Pd dan Hj. Eko Dedi Gunawan, M.Pd, Mahdalena, S.H. dan Dadang Saputra, S.E. H. Muhammad Syafril, S.T dan Eka Ristamaya, Amd.serta Adik bungsuku Aulia Fitriani, S.Kes yang selalu memberikan suportnya dalam menyelesaikan pendidikan ini.
4. Teman-teman seperjuangan di Yayasan Nurul Huda Lampung, SMA, SMK, SMP, SD, TK dan Ponpes Nurul Huda yang telah memberikan inspirasi dan dukungan dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Sahabat-sahabatku yang luar biasa di kelas MPI C bagaikan keluarga yang selalu memberikan motivasi dalam mneyelsaikan perkulaihan ini, mengenal kalian adalah sebuah berkah tersendiri dalam hidupku.

RIWAYAT HIDUP

Penulis di anugerahi nama oleh ayahanda dan ibunda dengan nama Novianti. Dilahirkan pada 24 Nopember 1974 di Jakarta. Putri pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Drs.H. Djamiludi, H.S. dan ibu Hj. Nurhayati.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah :

6. Pendidikan di SDN Way Urang Kalianda dan lulus pada tahun 1987.
7. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kalianda dan lulus pada tahun 1990.
8. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di SMAN 1 Kalianda yang selesai pada tahun 1993.
9. Pendidikan Strata 1 di Universitas Lampung Ekonomi Jurusan Manajemen, selesai pada tahun 1999. Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT serta dorongan dari orang tua penulis, selanjutnya pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pascasarjana ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Lampung (UIN) yang pada tahun 2017 mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam, sampai saat ini.

Bandar Lampung, Desember 2019

Zubaidah

NPM: 17861311035

KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat tasyakkur kahadirat Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan Ridho dan Inayah-Nya dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Hubungan Peran Komite Sekolah dan Partisipasi Masyarakat dengan Mutu Sekolah di Yayasan Nurul Huda Lampung”**

Sholawat beriringkan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan Tesis ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

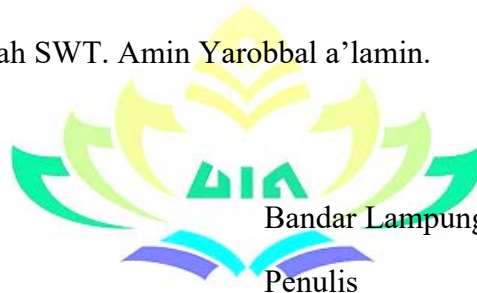
Dalam proses penulisan Tesis ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag.
beserta staf dan jajarannya. Bapak Prof. Idham, Khalid, M.Ag, selaku

Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Sekaligus Pembimbing I Pada penulisan tesis ini .

2. .Dr.Eti Hadiati,M.Pd, Selaku pembimbing I pada penulisan Tesis ini
3. Dr.Sayfrimen, M.Ed, selaku pembimbing II pada penulisan Tesis ini
4. Dr.Yetri Hasan, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
6. Staf dan karyawan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
7. Semua pihak yang turut serta membantu penulisan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lam.



Bandar Lampung, Desember 2019

Penulis

NOVIANTI

NPM. 1786131037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
RIWAYAT HIDUP.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
F. Definisi Istilah.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Mutu Sekolah	15
1. Konsep Mutu	15
2. Sekolah Bermutu.....	15
B. Peran Komite Sekolah	19
1. Komite Sekolah.....	19
2. Peranan Komite Sekolah dalam Pengelolaan Sekolah ..	25
3. Tujuan Komite Sekola.....	29
4. Komponen dan Indikator Kinerja Komite Sekolah.....	31
C. Partisipasi Masyarakat.....	36
1. Peran Masyarakat	36
2. Pemberdayaan Masyarakat.....	40
D. Hasil Penelitian yang Relevan.....	43
E. Kerangka Teoritik.....	44
F. Hipotesis Penelitian	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	51
C. Populasi dan Sampel.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
1. Instrumen Variabel Mutu Sekolah.....	54
a. Definisi Operasional.....	54

b. Kisi-kisi Instrumen.....	55
c. Skorsing (Pemberian Nilai).....	56
d. Uji Validitas dan Uji Reabilitas.....	57
2. Instrumen Peran Komite Sekolah.....	61
a. Definisi Operasional.....	61
b. Kisi-kisi Instrumen.....	61
c. Skorsing Pemberian Nilai.....	62
d. Uji Validitas dan Reabilitas.....	63
3. Instrumen Partisipasi Masyarakat.....	67
a. Definisi Operasional.....	67
b. Kisi-kisi Instrumen.....	67
c. Skorsing (Pemberian Nilai).....	68
d. Uji Validitas dan Reabilitas.....	69
E. Teknik Analisis Data.....	73
1. Analisis Data Deskriptif Kuantitatif.....	73
2. Korelasi Parsial.....	74
3. Korelasi Berganda.....	75
F. Hipotesis Statistika.....	76

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian.....	78
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	78
2. Kondisi Geografis	78
3. Kondisi Pendidik di Yayasan Nurul Huda.....	79
B. Gambaran Variabel Penelitian.....	81
1. Analisis Variabel Peran Komite Sekolah	81
2. Analisis Variabel Partisipasi Masyarakat.....	84
3. Analisis Variabel Mutu Sekolah.....	87
C. Pengujian Hipotesis Hasil Penelitian.....	89
1. Analisis Korelasi Parsial	89
2. Korelasi Berganda.....	91
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	92
1. Frekuensi Data Peran Komite Sekolah.....	92
2. Frekuensi Data Partisipasi Masyarakat.....	93
3. Frekuensi Data Mutu Sekolah.....	95
4. Ringkasan Data Penelitian.....	96

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	98
B. Implikasi	100
C. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

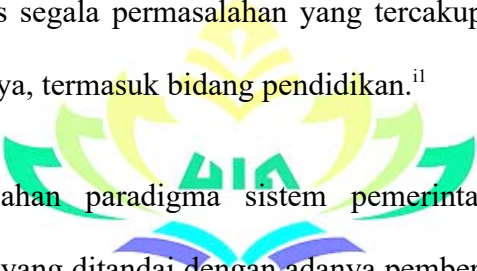
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin kompetitif menuntut setiap orang untuk berani berkompetisi agar bisa lebih dari sekedar bertahan tapi juga bisa eksis di masyarakat. Demikian halnya dengan lembaga pendidikan. Kompetisi untuk merebut pasar menuntut setiap lembaga mengedepankan kualitas dalam proses manajemen dan pembelajarannya, Kualitas juga sering disama artikan dengan mutu. Oleh karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan ecara terencana, terarah intensif, efektif, dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi.

Masyarakat selalu memandang bahwa sekolah yang bermutu adalah sekolah yang menghasilkan siswa atau output keluaran yang sukses padahal dalam kenyataannya kesuksesan seorang siswa tidak hanya sebuah hasil yang disebabkan oleh factor sekolah, namun secara bersama-sama anatar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam hal ini Bryan dan Henry mempresentasikan bahwa ketika pemangku kepentingan (sekolah, keluarga dan masyarakat) saling berkontributif membangun kemitraan , maka akan memuncullkan efek positif dalam diri siswa. Oleh karena itu diharapkan kedepannya kemitraan pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik dan bermakna.

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1997 telah mengakibatkan terjadinya pergeseran penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian melahirkan paradigma baru dari sentralisasi ke desentralisasi. Hal ini ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah dalam waktu “seketika”. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk menjadikan daerah lebih mandiri dan lebih memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri. Pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, berkeadilan dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah dengan titik sentral otonomi pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat, yaitu kabupaten dan kota. Hal yang dipandang lebih esensial dari otonomi daerah adalah semakin besarnya tanggung jawab daerah untuk mengurus tuntas segala permasalahan yang tercakup dalam pembangunan masyarakat di daerahnya, termasuk bidang pendidikan.¹¹



Adanya perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang ditandai dengan adanya pemberian otonomi yang luas kepada daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999) telah membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai salah satu bagian dari otonomi daerah maka sebagai realisasi dari peran serta masyarakat di

¹¹ H.Misbah , *Manajemen Berbasis Sekolah: Solusi Peningkatan Kualias Pendidikan*, (Jurnal Pendidikan) ,.

bidang pendidikan diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah wadah yang bernama generik Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah/Madrasah di tingkat satuan pendidikan. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propnas) tahun 2000-2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, dan sebagai implementasi dari tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.²

Sekolah MBS (*school based management*)³ kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan kedua konsep tersebut adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten atau *stakeholder* pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat atau *stakeholder* lainnya secara sistematis sebagai wujud peran serta

² Lebih jauh dapat dilihat dalam Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang dapat diakses guruonline.pendidikan.net/komitesekolah_bab1.html, http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah_bab2.html, http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah_bab3.html, dan http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah_bab4.html.

³ Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)/*School Based Management (SBM)* E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 11 dan Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hal. 7

dalam melakukan pengelolaan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, menjelaskan bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan akan semakin meningkat. Dewan pendidikan dan komite sekolah diharapkan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Melalui lembaga tersebut peran masyarakat akan semakin sentral dalam pendidikan⁴Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 dijelaskan bahwa komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat untuk me-ningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Termasuk di dalamnya membantu peningkatan standar mutu Sekolahatau yang lebih dikenal dengan sebutan 8 standar pendidikan, 1) Standar isi, 2) Standar Kompetensi Lulusan, 3) Standar proses pendidikan, 4) Standar sarana dan prasarana, 5) Standar pengelolaan, 6) Standar pembiayaan, 7) Standar penilaian pendidikan, 8) Standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Menjelaskan lebih jauh lagi tentang peran komite sekolah sebagai badan penghubung yaitu “*Engaging parents, carers and the community in education, including community and business partnerships*”. Komite sekolah sebagai badan penghubung meningkatkan keterlibatan orang tua, wali dan masyarakat dalam pendidikan, termasuk masyarakat dan perusahaan mitra sekolah atau DU/DI.

⁴ Depdiknas. (2002). *Kepmendiknas Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*

Haryadi, Meirawan, & Rahadi ⁵menjelaskan bahwa komite sekolah berperan sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan, meliputi kegiatan sebagai melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan organisasi pemerintah dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, dan menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Komite sekolah sebagai badan penghubung mempunyai tiga fungsi yaitu menjadi penghubung antara masyarakat dengan sekolah dalam perencanaan pendidikan, pelaksanaan program sekolah, dan pengelolaan sumber daya pendidikan. ⁶

Dalam perjalanannya, komite sekolah tidak sedikit mendapat sorotan tajam dari masyarakat, sebagian masyarakat justru berfikir bahwa Komite hanya merupakan kepanjangan tangan sekolah saja.. Di samping itu, pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan kurang mengetahui tentang fungsi dan peran komite sekolah. Komite sekolah dianggap sama saja dengan badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3). Hal ini menunjukkan sosialisasi komite sekolah belum terlaksana dengan baik kepada masyarakat bahkan kepada komite sekolah itu sendiri.

⁵ Haryadi, Y., Meirawan, D., & Rahadi, A. (2006). *Pemberdayaan komite sekolah: modul 1: penguatan kelembagaan komite sekolah*. Jakarta: Depdiknas

⁶ Depdiknas. (2003c). *Indikator kinerja dewan pendidikan dan komite sekolah*. Jakarta: Depdiknas

Sehingga terkadang terdengar berita yang mengisyaratkan ketidakmampuan Komite di beberapa sekolah dalam melaksanakan “harapan” yang ada pada lembaga tersebut. Mulai dari sebutan “numpang nama” atau sekedar datang rapat duduk diam, dan lain-lain, bahkan Amalia Safitri menulis dalam sebuah media onLine *Radar malang* tanggal 17 Januari 2019 tertulis berita Kinerja Komite Sekolah Masih Memprihatinkan;

Keberadaan komite sekolah (KS) tengah mengundang sorotan. Sejumlah kalangan menilai, selama ini banyak komite sekolah, terutama tingkat sekolah dasar (SD), yang mandul alias tak berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan ada indikasi, keberadaan komite hanya sebatas menjadi “stempel” kebijakan yang dibuat kepala sekolah.

”Ada banyak komite sekolah yang tidak paham dengan tugas dan fungsinya. Padahal komite sekolah memiliki peran strategis untuk memberi *controlling*,” papar Intan Dita Wira, anggota Tim Advokasi Malang Corruption Watch (MCW). Dia menambahkan, selama ini ada kecenderungan komite sekolah hanya manut saja saat tiba-tiba diminta tanda tangan terkait kebijakan kepala sekolah. Ironisnya, ada juga ketua komite sekolah yang tak tergantikan hingga lima belas tahun.

Menurut Intan, dari sejumlah kasus dan pengaduan yang masuk ke MCW, komite sekolah justru diisi oleh orang ‘titipan’ kepala sekolah. Sehingga komite sekolah alpa dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya. Mulai dari melakukan pengawasan penggunaan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) maupun dana anggaran khusus (DAK). Komite sekolah juga hanya dilibatkan saat dibutuhkan tanda tangan sebagai syarat berlakunya kebijakan kepala sekolah.

Melihat berita di atas yang mungkin saja banyak terjadi di berbagai tempat, menunjukkan bahwa posisi Komite Sekolah masih belum sampai pada tahap memenuhi harapan, di tambah lagi Komite sekolah yang telah dibentuk itu pun banyak yang belum memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) yang disusun berdasarkan aspirasi orangtua dan masyarakat sebagai komponen utama *stakeholder* pendidikan (Depdiknas, 2003a, p.2). Hasil kajian

yang dilakukan oleh Nurlaela,⁷ mengenai peran komite sekolah dalam membangun kemitraan antara DU/DI dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), menemukan bahwa peran komite sekolah masih kurang, baik sebagai lembaga pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan sebagai lembaga mediator. Alip & Soenarto⁸ juga menjelaskan bahwa peran komite sekolah yang paling menonjol adalah sebagai badan pendukung dan yang paling lemah adalah sebagai badan pengontrol, sedangkan Nurdin Hidayat menjelaskan bahwa peran komite sekolah yang paling lemah adalah sebagai badan pengontrol dan paling tinggi adalah sebagai badan pertimbangan.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Armansyah menjelaskan bahwa komite sekolah dalam melaksanakan perannya hanya sebagai pemberi pertimbangan dan pengawasan yang lebih utama, sedangkan perannya sebagai pendukung dan mediator belum sepenuhnya terlaksana¹⁰.

Salah satu contoh lembaga pendidikan yang telah mampu membentuk Komite Sekolah dengan mengefektifkan peran dan fungsinya adalah Yayasan Nurul Huda Lampung yang terletak di Desa Pemanggilan kecamatan Natar Lampung Selatan. Berdiri atas Prakarsa Bapak Ir. Badrudin yang berinisiatif

⁷ Nurlaela, L, et.al. (2011). *Strategi peningkatan hubungan kemitraan antara komite sekolah, dunia usaha/dunia industri dengan sekolah menengah kejuruan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah

⁸ Alip, M & Soenarto. (2008). Pelaksanaan per-an komite sekolah dalam penyelengga-raan SMK di DIY. *Jurnal Penelitian dan evaluasi Pendidikan*, 1(11), 146 - 162.

⁹ Hidayat, Nurdin. (2010). *Peran komite sekolah dalam implementasi manajemen pendid-dikan di SMK N 4 Yogyakarta dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta*. Tesis magister, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta

¹⁰ Armansyah. (2009). *Peranan dan pemberday-aan komite sekolah dalam penyeleng-garaan pendidikan SMA Negeri di Kota Binjai*. Tesis magister, tidak diterbitkan, Universitas Sumatra Utara. Medan

untuk membantu pemerintah dengan menyelenggarakan system pendidikan terpadu sebagai bentuk kepedulian dan kontribusinya terhadap bangsa. Inisiatif tersebut diwujudkan dengan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan memberdayakan partisipasi masyarakat, sehingga SDM yang dihasilkan menjadi manusia beriman, berkualitas, mumpuni, dan siap membangun bangsa Indonesia.

Yayssan Nurul Huda Lampung berdiri sejak tahun 1998 berdiri di antara himpitan yayasan-yayasan pendidikan sederajat lainnya yang tidak terlalu jauh jaraknya, seperti dalam tabel berikut

Tabel 1.1
Yayasan Pendidikan sederajat terdekat

No	Nama Sekolah	Jarak ke Tri Sukses	Keterangan
1	Yayasan Pendidikan Mutiara	800 m	Swasta
2	Yayasan Pendidikan Swadipa	1 Km	Swasta
3	Yayasan Pendidikan Alkautsar	2.5 Km	Swasta
4	Yayasan Pendidikan Yadika	4.5 KM	Swasta
5	Sekolah Negeri di Natar	5 Km	Negeri

Sumber : Data dari Google Map

Dari kondisi tersebut jumlah siswa di Yaysan Nurul Huda Lampung dalam beberapa tahun terakhir ini tidak banyak perubahan yang sifgnifikan, artinya masih dalam kisaran angka yang tida jauh beda dari tahun ke tahun Berikit tabel perkembangan jumlah siswa dalam 3 tahun pelajaran terakhir.

Tabel.1.2
Data Jumlah Siswa

No	Tahun Pelajaran	SD	SMP	SMA	SMK
1	2019/2020	425	286	525	120
2	2018/2019	440	270	520	112
3	2017/2018	460	268	480	98

Sumber : Data administrasi sekolah

Komite Sekolah Yayasan Nurul Huda Lampung sangat berperan terhadap peningkatan mutu sekolah di lembaga ini. Dari data yang di dapat oleh peneliti melalui beberapa sumber administrasi Sekolah, terlihat bahwa keterlibatan Komite Sekolah di beberapa kegiatan program kerja sekolah cukup signifikan. Berdasarkan buku tamu misalnya, terbaca Komite sekolah mengisi daftar buku tamu dalm satu bulan minimal 2 (dua) kali dakam sebulan (selain bila ada rapat khusus, baik intern dengan pihak pengelola sekolah atau dengan masyarakat), dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabe. 1.3.
Data Kehadiran Komite di Yaysan Nurul Huda Lampung 3 tahun terakhir

No	Bulan	Jumlah Kunjungan ke Sekolah			Keterangan
		2016	2017	2018	
1	Januari	1	2	1	
2	Februari	2	2	2	
3	Maret	2	2	3	
4	April	3	3	3	
5	Mei	2	2	2	
6	Juni	2	1	3	PPDB
7	Juli	2	3	3	PPDB
8	Agustus	2	2	2	Rapat Komite
9	September	2	3	1	
10	Oktober	2	2	1	
11	Nopember	2	2	2	
12	Desember	1	1	1	
Jumlah		23	25	24	

Rata – rata/bulan				
-------------------	--	--	--	--

Sumber : Buku tamu sekolah

Begitu juga dalam hal sarana dan prasarana sekolah, pihak komite bekerjasama dengan sekolah tentunya telah melaksanakan pembangunan maupun perawatan rutin gedung dan alat sekolah dengan tanpa dana bantuan BOS.

Tabel 1.4.

Pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah

No	Tahun	Kegiatan	Pelaksana
1	Setiap awal tahun	Pengecatan gedung, meubelair kelas dan kantor	Komite sekolah
2	2016	Penambahan meubelair kelas	SarPras Sekolah
3	2017	Rehab ruang guru dan Kantor	Komite Sekolah
4	2018	Perbaikan pengairan dan taman	Koniite Sekolah

Sumber : Data Pembangunan sekolah

Dari tabel di atas terlihat perkembangan yang dilakukan sekolah dibantu pihak terkait termasuk komkrite sekolah dari tahun ke tahunnya. Dalam hal ini Komite Sekolah selalu memberikan dukungan baik yang berupa tenaga, pemikiran maupun material. Melihat perkembangan sekolah selama 5 tahun terakhir ini peneliti berkesimpulan bahwa ada hubungan korelasi yang erat antara Komite dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah di Yayasan Nurul Huda Lampung. Komite Sekolah di Lembaga ini dalam pembentukannya telah melalui proses dengan menggunakan prinsip Transparan, Akuntabel dan Demokratis. Selain itu Komite Sekolah mempunyai program kerja yang jelas untuk membantu dalam peningkatan mutu pendidikan di Yayasan Nurul Huda Lampung

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa masih adanya Komite Sekolah di beberapa lembaga yang belum mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, maka dipandang perlu untuk melihat sejauh mana hubungan antara peran komite sekolah dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melihat lebih dalam lagi tentang peran pihak Komite Sekolah dalam pengelolaan atau manajemen sekolah di Yayasan Nurul Huda Lampung. mulai dari penyusunan program, pelaksanaan program dan evaluasi program, sehingga dapat dinyatakan berperan dengan baik, dikaitkan dengan pendapat dari Kim tentang Komite sekolah .

Komite sekolah yang dibentuk di setiap sekolah, merupakan lembaga strategis dan sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Komite sekolah menurut Kim sebagai berikut¹¹.

The school council is a collective decision-making body through broad participation of teachers, parents, and community lead-ers in the important decision-making process about school management.

Komite sekolah atau dewan sekolah adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi dari para guru, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang pengelolaan sekolah. Komite sekolah yang ada di luar negeri contohnya di Boston yaitu salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Komite sekolah yang dikenal dengan nama *The Boston School Commitee*.

The School Committee is responsible for: defining the vision, mission and goals of the Boston Public Schools; establishing and monitoring the annual operating bud-

¹¹ Kim A. (2004). Parent school partnership for-mation through the school council in Korea. *Educational Research for Policy and Practice*, 3, 127–139.

get; hiring, managing and evaluating the Superintendent; and setting and reviewing district policies and practices to support student achievement.(Boston Public School, 2013, p.1)

Komite sekolah adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menentukan visi, misi dan tujuan dari sekolah, menetapkan dan memantau anggaran operasional tahunan, menggunakan, mengelola dan mengevaluasi, dan menentukan serta mengkaji kebijakan dan praktik untuk mendukung prestasi siswa.

Sejalan dengan latar belakang di atas, maka dipandang perlu untuk melihat hubungan peran komite sekolah dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pengelolaan sekolah di Yayasan Nurul Huda Laampungr berdasarkan pendapat Kim yaitu dalam hal :

- Menentukan visi, misi dan tujuan dari sekolah,
- Menetapkan dan memantau anggaran operasional tahunan,
- Menggunakan, mengelola dan mengevaluasi,
- Menentukan serta mengkaji kebijakan dan praktik untuk mendukung prestasi siswa.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi maslah dari latar belakang yang dipaparkan di atas yakni :

1. Belum Optimalnya Peran Komite Sekolah dalam mendukung Program Sekolah di Yayasan Nurul Huda Lampung
2. Belum optimalnya kepedulian dari masyarakat terhadap kegiatan sekolah di Yayasan Nurul Huda Lampung
3. Mutu Sekolah belum sesuai sebagaimana yang diharapkan.

.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada Peran Komite Sekolah, Partisipasi Masyarakat dalam mendukung program sekolah dan Mutu Sekolah.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut sebagai berikut :

1. Adakah Hubungan Peran Komite Sekolah dengan Mutu sekolah.
2. Adakah Hubungan Partisipasi masyarakat dengan Mutu Sekolah.
3. Adakah Hubungan secara simultan dari Peran Komite Sekolah dan Partisipasi Masyarakat dengan Mutu Sekolah.

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Komite Sekolah sesuai pendapat dari Kim.A tentang Peran Komite Sekolah tentang :

1. Untuk melihat Hubungan Peran Komite Sekolah dengan mutu Sekolah.
2. Untuk melihat Hubungan Partisipasi masyarakat dengan mutu sekolah.
3. Untuk membuktikan hubungan secara sinergi dari Peran Komite Sekolah dan Partisipasi Masyarakat dengan Mutu Sekolah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu manajemen pendidikan, terutama konsep yang mendalam tentang peran komite sekolah dan partisipasi masyarakat dengan mutu sekolah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi komite sekolah, dan masyarakat dalam menjalankan peran-peran yang harus dilakukan dalam meningkatkan mutu sekolah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah diperlukan untuk menghindari adanya salah tafsir dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah :

1. Mutu sekolah adalah suatu rangkaian kegiatan yang beintikan perencanaan pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tetukan.
2. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

3. Masyarakat merupakan orang yang ada di lingkungan sekolah mempunyai peranan penting bagi keberlangsungan pengembangan program sekolah.



BAB II


KAJIAN TEORITIK

A. Mutu Sekolah

1. Konsep Mutu

Mutu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri.¹² Mutu memiliki pengertian yang beragam jika diterapkan pada sesuatu tergantung pada barang apa yang dihasilkan, dipakai, dan anggapan orang. Definisi konvensional mendefinisikan karakteristik langsung dari suatu produk, sedangkan definisi modern menjelaskan bahwa mutu adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Namun, konsep dasar mutu adalah segala sesuatu yang dapat diperbaiki karena pada dasarnya tidak ada proses yang sempurna.

2. Sekolah Bermutu



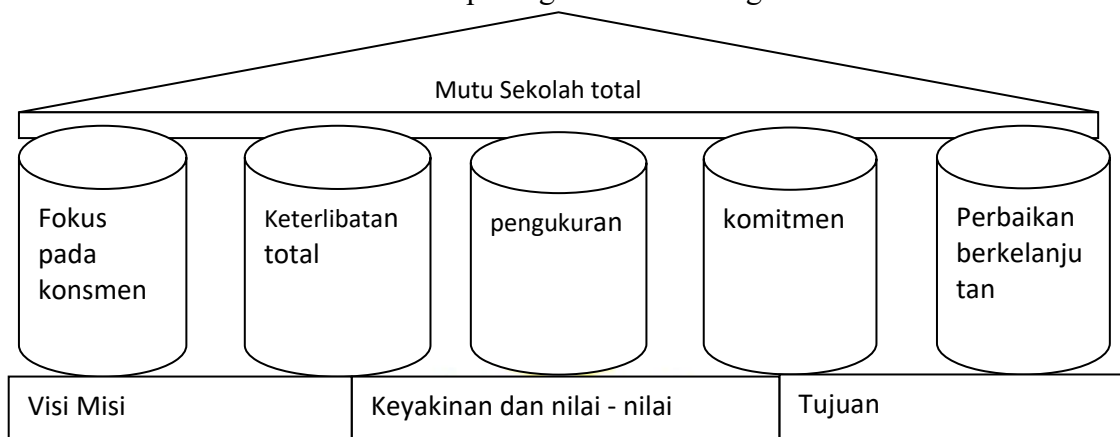
Berkenaan dengan sekolah bermutu, ada beberapa model (karakteristik) sekolah bermutu¹³ diantaranya adalah : *pertama* , fokus pada customer. Dalam meningkatkan penyelenggaraan mutu pendidikan sekolah harus melayani kebutuhan konsumen baik internal maupun eksternal; *kedua* , keterlibatan total .Semua komponen yang berkepentingan harus terlibat secara langsung dalam pengembangan mutu; *ketiga*, pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan cara evaluasi, evaluasi ini dijadikan acuan dalam meningkatkan penyelenggaraan mutu

¹² Peters dan Austin, *Manajemen Mutu* (Press 1985), h.53-55

¹³ Jerome S Acaro, *Konsep Sekolah Bermutu* , 2007, h. 123

pendidikan; *keempat*, komitmen. Hal lain yang menyangkut pendidikan bermutu adalah adanya komitmen bersama terhadap budaya mutu; *kelima*, memandang pendidikan sebagai sistem. Pandangan seperti ini akan dapat mengeliminasi pemborosan dari pendidikan dan dapat memperbaiki mutu setiap proses pendidikan; *keenam*, perbaikan berkelanjutan. Prinsip dasar mutu adalah perbaikan secara terus menerus (berkelanjutan) langkah ini dilakukan secara konsisten menemukan cara menangani masalah dan membuat perbaikan yang diperlukan.

Model sekolah bermutu dapat digambarkan sebagai berikut :



Dalam rangka mengetahui mutu di suatu sekolah dengan cara mengukur kekuatan dan kelemahan.

Tabel. 2.1
Contoh analisis mutu sekolah

Pilar mutu	Kekuatan	Kelemahan
Fokus pada konsumen	Seara berkala mengada- kan pertemuan dengan staf, siswa , orang tua, dan wakil-wail komunitas untuk merumuskan keinginannya	Kurang menanggapi keluhan staf, siswa, orang tua atau komunitas
Keterlibatan total	Para staf sama-sama bertanggung jawab untuk memecahkan masalah saat pengembangan sekolah bermutu	Secara umum staf menunggu manajemen untuk memecahkan masalah
Pengukuran	Mengumpulkan data untuk mengukur perbakan dan untuk mengembangkan solusi	Tidak mencatat kemajuan hanya berjalan menuju lasalah berikutnya
Komitmen	Menejemen memberikan pelatihan sistem dan pross yang dibutuhkan untuk mengubah cara kerja guna memperbaiki mutu dan menigkatkan produktivitas	Dukungn untuk mutu terisolasi dan tida diakui oleh staf, siswa dan komunitas
Perbaikan berkelanjutan	Secara konstan mencari cara untuk memperbaiki setiap pross pendidikan	Mengisi dengan hal – hal sebagaimana adanya sekalipun ada masalah

		tidak menganggapnya sebagai masalah
--	--	-------------------------------------

Keberhasilan penerapan manajemen mutu di sekolah diukur dari tingkat kepuasan pelanggan, seperti yang dikemukakan oleh Tim Depdiknas (1999) bahwa keberhasilan sekolah mencakup hal – hal sebagai berikut :

1. Siswa puas dengan layanan sekolah, yaitu dengan pelajaran yang diterima, perlakuan guru, pimpinan, puas dengan fasilitas yang disediakan sekolah, atau dengan kata lain siswa menikmati situasi sekolah dengan baik.
2. Orang tua siswa merasa puas dengan layanan terhadap anaknya, layanan yang diterimanya dengan laporan tentang perkembangan kemajuan belajar anaknya, dan program yang dijalankan sekolah.
3. Pihak pemakai atau penerima lulusan puas karena menerima lulusan dengan kualitas baik.
4. Guru dan karyawan puas dengan layanan sekolah, dalam bentuk pembagian kerja, hubungan dan komunikasi antar guru/ pimpinan , karyawan, gaji yang diterima , atau layanan yang lainnya.

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia ditandai dengan banyaknya lulusan yang tidak dapat diserap oleh pendidikan di atasnya.¹⁴ Hal ini disebabkan rendahnya tingkat kemampuan, keterampilan dan pengetahuan mereka, artinya *output* lulusan tidak mempunyai kualitas yang sesuai tuntutan persyaratan pengguna lulusan. Menurut Beeby dalam Noesan (2003) dapat dilihat dari

¹⁴ Poiasti, *Manajemen Mutu Pendidikan*, 2010 h. 10

perspektif ekonomi, sosiologi dan pendidikan. Dari perspektif ekonomi, pendidikan yang bermutu dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ditinjau dari sisi Sosiologis mutu pendidikan berarti pendidikan yang bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan lingkungannya dalam hubungan dengan kelompok, perkembangan budaya, serta mempersiapkan masyarakat untuk menerima perubahan dan perkembangan teknologi.¹⁵

Sedangkan mutu pendidikan di suatu sekolah dapat dilihat dari 5 (lima) macam penilaian sebagai berikut,

- a. Prestasi siswa yang dihubungkan dengan norma nasional dan agama dengan menggunakan skala nilai (bidang akademik)
- b. prestasi siswa yang berhubungan dengan kemampuan (non akademik)
- c. kualitas belajar mengajar
- d. kualitas mengajar (kurikulum yang dilaksanakan)
- e. kinerja sekolah (pengelolaan sekolah)

B. Peran Komite Sekolah

1. Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak egitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu

¹⁵ Nur Zazim, *Sosiologi Mutu Pendidikan*, 2011 h 65

sekolah. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan,¹⁶

Depdiknas dalam bukunya berpartisipasi masyarakat, menguraikan tujuh peranan komite sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah yakni :

- a. Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar disekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
- b. Melakukan penilaian sikap dan perilaku siswa, membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini, keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolahraga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.
- c. Mencari sumber pandangan/ donatur untuk membantu siswa yang tidak mampu agar bisa bersekolah.
- d. Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan.
- e. Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah.
- f. Melakukan pembahasan tentang usulan rancangan anggaran pendapatan

¹⁶ Kemdikbud. (2013). *Panduan penyusunan pro-posal bantuan sosial dewan pendidikan dan komite sekolah*. Jakarta: Kemdikbud

dan belanja sekolah.

- g. Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu.

Masyarakat yang merupakan lembaga ketiga, sebagai lembaga pendidikan, dalam konteks penyelenggaraan pendidikan itu sendiri besar sekali peranannya. Menurut Hasbullah ada beberapa peranan dari masyarakat terhadap pendidikan (sekolah) yaitu:

1. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah.
2. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita kebutuhan sekolah.
3. Masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung museum, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, kebun binatang dan sebagainya.
4. Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Mereka dapat diundang kesekolah untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu masalah yang sedang dipelajari anak didik. Orang-orang yang punya keahlian khusus banyak sekali terdapat dimasyarakat, seperti petani, peternak, saudagar, polisi, dokter, dan sebagainya.
5. Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Disamping buku-buku pelajaran, masyarakat memberi bahan pelajaran yang banyak sekali, antara lain seperti aspek alami industri, perumahan, transport, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya.

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerja sama dengan orangtua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya, sangat diperlukan manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama. Dengan demikian, prinsip kemandirian dalam otonomi sekolah adalah kemandirian dalam nuansa kebersamaan. Hal ini merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip yang disebut sebagai *total quality management*, melalui suatu mekanisme yang menekankan pada mobilisasi kekuatan secara sinergis yang mengarah pada satu tujuan, yaitu peningkatan dan pengendalian mutu, serta kesesuaian pendidikan dengan pengembangan masyarakat.

Komite sekolah memiliki kedudukan yang kuat, karena telah termaktup dalam UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, khususnya pasal 56 ayat (1),(2),(3) dan (4). Pasal 56 (3) menyebutkan bahwa komite sekolah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Dalam sistem pemerintahan yang kebijakannya bersifat sentralistik, partisipasi masyarakat dalam kebijakan-kebijakan yang di buat dan diimplementasikan tidak begitu di permasalahan, namun dalam konteks ekonomi

daerah dan desentralisasi pendidikan dewasa ini, tingginya partisipasi masyarakat dapat di jadikan tolok ukur keberhasilan kebijakan tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sekolah dan masyarakat merupakan *partnership* dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan. Aspek tersebut yaitu Sekolah yang memiliki karakteristik bahwa partisipasi warga sekolah dan masyarakat merupakan bagian kehidupannya. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki. Makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggung jawab, dan makin besar rasa tanggung jawab, makin besar pula tingkat dedikasinya.”¹⁷

Hubungan dengan masyarakat akan tumbuh jika masyarakat juga merasakan manfaat dari keikutsertaan dalam program sekolah. Manfaat dapat diartikan secara luas, termasuk rasa diperhatikan dan rasa puas karena dapat menyumbangkan kemampuannya bagi sekolah. Jadi prinsip menumbuhkan hubungan dengan masyarakat adalah dapat saling member kepuasan. Salah satu jalan penting untuk membina hubungan dengan masyarakat menetapkan komunikasi yang efektif.

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh Kepala Sekolah untuk menggalang partisipasi masyarakat antara lain:

- a. Melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti bakti sosial, perpisahan, peringatan hari besar nasional, keagamaan dan pentas seni. Pelibatan masyarakat di

¹⁷ Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

sesuaikan dengan hobi, kemampuan, dan pekerjaan mereka dengan program dan kegiatan yang akan di lakukan di sekolah.

- b. Mengidentifikasi tokoh masyarakat, yaitu orang-orang yang mempengaruhi masyarakat pada umumnya. Tokoh tersebut pertama kali harus di hubungi, diajak kompromi, konsultasi, dan diminta bantuan untuk menarik masyarakat berpartisipasi dalam program dan kegiatan sekolah. Tokoh tersebut mungkin berasal dari orang tua peserta didik, figur masyarakat (kiai), olahragawan, seniman, psikolog, dokter, dan pengusaha.
- c. Melibatkan tokoh masyarakat tersebut dalam berbagai program dan kegiatan sekolah yang sesuai dengan minatnya. Misalnya olahragawan dilibatkan dalam pembinaan dalam olahraga di sekolah, dokter dapat dilibatkan dalam usaha kesehatan sekolah (UKS), dan Palang Merah Remaja (PMR), psikolog dapat di libatkan dalam kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan. Selanjutnya tokoh masyarakat tersebut dijadikan mediator masyarakat pada umumnya.
- d. Memilih waktu yang tepat untuk melibatkan masyarakat sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Misalnya PORDA, ketika minat masyarakat terhadap sedang meningkat, awal pelibatan dokter di mulai pada hari Kesehatan Nasional, atau pada saat kegiatan imunisasi di sekolah.

Oleh sebab itu peran komite sekolah dalam menjembatani kepentingan diantara masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan senantiasa memerlukan kecermatan identifikasi tersebut. Ketika ada keluhan masyarakat yang masuk, ada

keengganan memanfaatkannya sebagai masukan bagi koreksi perbaikan. Pada tingkat apa dan dengan cara bagaimana dialog public, maka disinilah posisi menggandeng komite sekolah untuk memperoleh dukungan dari masyarakat.

2. Peranan Komite Sekolah dalam Pengelolaan Sekolah.

Dalam hal ini pendapat yang digunakan peneliti adalah Komite sekolah menurut Kim sebagai berikut¹⁸.

The school council is a collective decision-making body through broad participation of teachers, parents, and community lead-ers in the important decision-making process about school management.

Komite sekolah atau dewan sekolah adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi dari para guru, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang pengelolaan sekolah. Komite sekolah yang ada di luar negeri contohnya di Boston yaitu salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Komite sekolah yang dikenal dengan nama *The Boston School Commite*.

The School Committee is responsible for: defining the vision, mission and goals of the Boston Public Schools; establishing and monitoring the annual operating budget; hiring, managing and evaluating the Superintendent; and setting and reviewing district policies and practices to sup-port student achievement.(Boston Public School, 2013, p.1)

Komite sekolah adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menentukan visi, misi dan tujuan dari sekolah, menetapkan dan memantau anggaran operasional tahunan, menggunakan, mengelola dan mengevaluasi, dan

¹⁸ Kim A. (2004). Parent school partnership for-mation through the school council in Korea. *Educational Research for Policy and Practice*, 3, 127–139.

menentukan serta mengkaji kebijakan dan praktik untuk mendukung prestasi siswa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komite sekolah adalah suatu lembaga mandiri yang dibentuk untuk mewadahi peran serta masyarakat di setiap satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Komite sekolah diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah, sehingga timbul rasa saling memiliki dan saling bertanggung jawab dalam kemajuan sekolah.

Dari pendapat di atas maka penulis menarik 3 point penting dalam peranan yang diharapkan dilakukan oleh Komite Sekolah yaitu , (1) *menentukan visi, misi dan tujuan dari sekolah*, Komite sekolah dalam hal ini berperan menjaga agar pelaksanaan kegiatan sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah, (2) *menetapkan dan memantau anggaran operasional tahunan*, dalam hal ini Komite ikut berperan aktif pada saat rapat penentuan anggaran, juga sekaligus memantau penggunaannya, (3) *menentukan serta mengkaji kebijakan dan praktik untuk mendukung prestasi siswa.*, peran komite pada bidang ini berkait dengan mutu sekolah di mata masyarakat, maka seperti ikut dalam rapat dan memantau kinerja dari pengelola prestasi siswa. Tiga peran utama ini yang akan dilihat lebih dalam oleh penulis dalam mendeskripsikan tugas atau peran Komite Sekolah.

Komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Pembentukan komite sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Komite sekolah merupakan lembaga yang sangat penting

bagi keberlangsungan sekolah. Khan et. al.¹⁹ menjelaskan bahwa “*School councils may facilitate head teachers in different academic, administrative and financial issues of the school*”. Komite sekolah mempunyai tanggung jawab dalam beberapa aspek yaitu administratif, akademik, dan finansial sekolah. *Frontier School Division in Manitoba Canada*, menjelaskan bahwa komite sekolah terlibat dalam tiga aspek perencanaan sekolah yaitu mengidentifikasi topik, masalah dan pri-oritas untuk dimasukkan dalam rencana sekolah multi-tahun, rencana anggaran, rencana laporan sekolah dan laporan masyarakat.

Peran Komite Sekolah dalam Pengelolaan Pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak yang terkait khususnya dalam pendidikan, baik guru, Kepala Sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien. Dalam kamus besar bahasa Indonesia di kemukakan bahwa peran atau peranan adalah hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu pengelolaan pendidikan.

“Suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan suatu pelaksanaan dari gejala suatu yang diikutsertakan dalam perencanaan suatu pelaksanaan dari gejala suatu yang berpusat pada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat

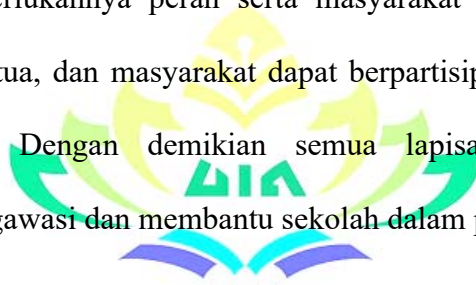
¹⁹ Khan, M., et.al. (2013). Impact of school councils on head teachers' efficiency. *Journal of educational research dept of education IUB Pakistan*, 16(1), 15-26.

kewajiban.”²⁰

Pengelolaan satuan pendidikan harus ada pelibatan langsung dari masyarakat yang merupakan salah satu pemegang hak maka tujuan-tujuan lembaga-lembaga pendidikan harus pula menampung apa yang di inginkan oleh masyarakat dan bukan hanya menampung apa yang di inginkan oleh birokrasi.²¹

Dalam kaitan ini perlu ada lembaga atau struktur organisasi di lembaga-lembaga pendidikan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bukan hanya dalam memberikan investasi dalam pendidikan berupa SPP pajak, dan sebagainya, melainkan juga ikut serta dalam merencanakan kurikulum pendidikan, evaluasi pendidikan, dan hal-hal yang menyangkut proses belajar.

Oleh sebab itu salah satu aspek penting peningkatan mutu pengelolaan sekolah adalah di perlukannya peran serta masyarakat yaitu melalui komite sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan berbagai keputusan. Dengan demikian semua lapisan masyarakat lebih memahami serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan tersebut.



3. Tujuan Komite Sekolah

²⁰ Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan: kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada) hlm. 96-98

²¹ Tilaar, H,A,R. 2009. *Standarisasi Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta) h. 109

Komite Sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintah. Komite Sekolah dapat terdiri dari setiap satuan pendidikan atau berupa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang, tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau karena pertimbangan yang lain.

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya wadah organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada penggunaan (*client model*), berbagi kewenangan (*power sharing and advocacy*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut²² :

²² Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan: kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm. 96-98

- (1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah.
- (2) Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- (3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Oleh sebab itu komite sekolah sangat dibutuhkan perannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya yang ada di sekolah, dan fokus kajiannya adalah bagaimana memberikan kontribusinya terhadap sekolah yang menggandengnya, karena kualitas menjadi parameter, maka usaha perbaikan pengembangan, dan percepatan secara konsisten harus ditingkatkan.

Pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah dalam tempat yang berlainan dimungkinkan untuk menggunakan sistem pendekatan pembelajaran yang berlainan. Kepala sekolah diberikan keleluasaan untuk mengelola pendidikan dengan jalan mengadakan serta memanfaatkan sumber-sumber daya pendidikan sendiri-sendiri asalkan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pusat. Karena karakteristik setiap siswa juga berbeda-beda secara individual, pendekatan pembelajaran juga di mungkinkan berbeda untuk masing-masing siswa yang berlainan.

Dengan kondisi seperti itu, komite sekolah akan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing sekolah.

Komite sekolah dapat melaksanakan fungsinya sebagai partner dari kepala sekolah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitas bagi guru-guru dan siswa untuk banyak belajar sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif.

Adanya sinergi antara komite sekolah dengan sekolah menyebabkan lahirnya tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja yang membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.

4. Komponen dan Indikator Kinerja Komite Sekolah

Komponen dan indikator kinerja Komite Sekolah tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dengan peran yang dilakukannya, yakni sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengawas (*controlling agency*), dan badan mediator (*mediator agency*). Berkaitan dengan peran Komite Sekolah tersebut, tercakup di dalamnya pelaksanaan berbagai fungsi badan-badan tersebut dan fungsi manajemen pendidikan²³

a. Komite Sekolah sebagai Badan Pertimbangan (Advisory Agency)

Di tengah era otonomi daerah sekarang ini, partisipasi dan keterlibatan masyarakat menjadi alat ukur dalam keberhasilan kebijakan dan program pada berbagai bidang, termasuk pendidikan. Untuk itu, sebagai badan atau lembaga yang non-struktural, dalam perannya sebagai badan yang memberikan

²³ Tim Pengembangan Komite Sekolah Ditjen Depdiknas.

pertimbangan atau nasihat, Komite Sekolah memiliki peran yang sangat krusial sebagai jembatan dalam menggali berbagai aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian dibahas dalam musyawarah Komite Sekolah untuk dimasukkan dalam perencanaan sekolah.

Komite Sekolah dalam fungsi perencanaan memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, termasuk dalam penyelenggaraan rapat RAPBS. Dalam pelaksanaan program, yang menyangkut kurikulum, PBM, dan evaluasi. Komite Sekolah sebagai badan penasihat berperan penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk proses pembelajarannya. Hal ini penting, sebab dengan berlakunya otonomi pendidikan dengan pengelolaan pendidikan yang lebih otonom di sekolah, guru memiliki peran yang penting dalam penciptaan proses pembelajaran yang kondusif bagi sarana demokratisasi pendidikan.

Sedangkan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, antara lain SDM, Sarana dan prasarana, dan alokasi anggaran. Komite Sekolah dalam fungsinya sebagai badan penasehat bagi sekolah, antara lain berperan mengidentifikasi berbagai potensi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. Fungsi ini akan dapat berguna dalam memberikan pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat yang dapat diperbantukan di sekolah.

b. Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung (*Supporting Agency*)

Dalam perannya sebagai badan pendukung (*supporting agency*), melalui koordinasi dengan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah diharapkan mendapat gambaran yang utuh mengenai persoalan yang terjadi di beberapa sekolah secara keseluruhan, khususnya terkait dengan masalah tenaga kependidikan. Hal ini dimaksudkan agar kekurangan tenaga kependidikan pada beberapa sekolah di suatu daerah tidak dibiarkan terus terjadi sehingga akan mengganggu pelaksanaan pendidikan. Komite Sekolah kemudian dapat menindaklanjuti dengan melakukan pemberdayaan guru sukarelawan, termasuk tenaga kependidikan non-guru, di sekolah yang masih menghadapi persoalan dalam kekurangan tenaga kependidikan.

Komite Sekolah juga dapat mengidentifikasi tenaga ahli yang ada dalam masyarakat, yang dapat dimanfaatkan bagi sekolah. Dengan demikian, aspek integrasi sekolah dengan masyarakat yang selama ini menjadi persoalan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah dapat diatasi, karena masyarakat dapat terlibat dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan.

Sarana dan prasarana sebagai bagian dari pelaksanaan proses pendidikan, juga harus mendapat perhatian penting. Sekolah yang kurang memiliki sarana dan prasarana memadai tentu akan mengalami kendala dalam pencapaian hasil belajar. Oleh karena itu, Komite Sekolah berfungsi memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Tahap selanjutnya, tentu Komite Sekolah akan memberdayakan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui

sumber daya yang ada pada masyarakat, dengan berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan. Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang telah dilakukan Komite Sekolah dengan koordinasi pada Dewan Pendidikan akan dipantau perkembangannya melalui evaluasi pelaksanaan dukungan atau bantuan tersebut.

Memang harus diakui, anggaran pendidikan yang ada pada pemerintah (daerah) sangat terbatas. Karena itu pemanfaatan sumber-sumber anggaran pendidikan yang ada pada masyarakat menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam era otonomi pendidikan yang meletakkan otonomi sekolah sebagai hal yang terpenting, sekolah merupakan bagian yang terpenting dari masyarakat sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan rasa memiliki terhadap sekolah.

c. Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol (*Controlling Agency*)

Tanpa menafikan bagian-bagian lain dalam sebuah manajemen, namun dapat dikatakan bahwa bagian yang terpenting dalam manajemen adalah *controlling*. Peran Komite Sekolah sebagai badan pengontrol tentu akan berbeda dengan apa yang dilakukan DPRD Komisi E Bidang Pendidikan. Berkaitan dengan pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana peran pengontrol yang dilakukan Komite Sekolah berjalan dengan optimal terhadap pelaksanaan pendidikan.

Komite Sekolah dalam hubungannya dengan perannya sebagai badan pengontrol terhadap perencanaan pendidikan, memiliki beberapa fungsi yang dapat dilakukan antara lain melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Pendidikan, termasuk penilaian terhadap

kualitas kebijakan yang ada. Komite Sekolah dapat melakukan fungsi yang sama seperti yang dilakukan Dewan Pendidikan, yaitu melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, termasuk kualitas kebijakan yang ada.

Fungsi Komite Sekolah dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program pendidikan adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program yang ada pada sekolah, apakah sesuai dengan kebijakan yang disusun. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program tersebut adalah bagaimana alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program dilakukan sekolah. Dalam pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana Komite Sekolah melakukan fungsinya dalam mengontrol alokasi dana dan sumber-sumber daya tersebut.

Program penuntasan wajib belajar 9 tahun tidak boleh mengesampingkan mutu pendidikan. Sementara ini, yang menjadi ukuran keberhasilannya adalah nilai pada ujian akhir. Dalam kaitannya dengan ini, Komite Sekolah memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap penilaian terhadap hasil ujian akhir. Karena penilaian terhadap hasil keluaran pendidikan di sekolah-sekolah tersebut akan menjadi masukan bagi Dewan Pendidikan untuk memetakan persoalan dalam pemerataan dan mutu keluaran pendidikan.

d. Komite Sekolah Sebagai Mediator (*Mediator Agency*)

Dalam kaitannya dengan fungsi manajemen pendidikan, koordinasi, kerlibatan, serta partisipasi merupakan kegiatan yang penting dalam perencanaan. Sedangkan dalam perannya sebagai badan mediator, Komite Sekolah berfungsi sebagai mediator dan menjadi penghubung sekolah dengan masyarakat, atau antara sekolah dengan Dinas Pendidikan. Berbagai persoalan yang sering dialami orangtua dalam pelaksanaan pendidikan anak-anaknya di sekolah misalnya seringkali terbentur pada sebatas keluhan, kurang direspons sekolah. Oleh karena itu, kehadiran Komite Sekolah pada posisi ini sangat penting dalam mengurangi berbagai keluhan orangtua tersebut.

Peran sebagai mediator yang dilakukan Komite Sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan lebih kepada upaya memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat terhadap kebijakan dan program pendidikan yang ditetapkan sekolah. Peran ini antara lain dengan mengkomunikasikan berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah terkait dalam bidang pendidikan. Masukan ini tentu akan menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan, yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan bagi kebijakan dan program pendidikan. Bagi Komite Sekolah, hasil penyempurnaan kebijakan dan program tersebut juga harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga terjadi umpan balik (*feedback*) bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan di daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah dapat akuntabel kepada masyarakat.

C. Partisipasi masyarakat

1. Peran Masyarakat


Apabila kita melihat fenomena di masyarakat, seakan-akan ada jurang pemisah antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat. Ada pula anggapan bahwa sekolah hanya sekadar tempat penitipan anak karena orang tua tidak mempunyai waktu dan kemampuan untuk mendidik anaknya. Penghargaan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah menjadi rendah, mungkin karena mereka merasa telah memberikan imbalan yang cukup kepada sekolah. Padahal jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai anak berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa tidak seimbang dengan imbalan yang dibayarkan orang tua kepada sekolah. Komunikasi antara orang tua dan masyarakat dengan sekolah jarang terjadi.

Hubungan antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat perlu dipererat sehingga tanggung jawab pendidikan bukan hanya dibebankan kepada sekolah. Dengan terbentuknya komite sekolah, diharapkan menjadi penghubung antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat, sehingga mereka dapat diberdayakan secara optimal dalam pendidikan. Orang tua dan masyarakat harus diajak aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Mereka harus ikut menentukan dan membuat program bersama sekolah dan pemerintah. Mereka harus ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran maupun non instruksional. Orang tua harus menyediakan waktu untuk berkunjung ke sekolah dan kelas untuk mengontrol pendidikan anaknya, berdiskusi dengan guru untuk mengetahui hambatan dan kemajuan yang dihadapi anaknya.

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XV pasal 54 dinyatakan bahwa :

- (1) Peran masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan mutu layanan pendidikan.
- (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

Kata partisipasi ditinjau dari segi etimologis menurut Suwanto (1983) merupakan : Meminjam dari bahasa Belanda "*participation*" yang sebenarnya dari bahasa latin "*participatio*". Perkataan "*participatio*" sendiri terdiri dari dua suku kata yakni *pars* dan *copere* yang berarti mengambi bagian. Perkataan "*participatio*" sendiri berasal dari kata kerja "*participare*" yang berarti ikut serta. Dengan demikian partisipasi mengandung pengertian aktif, yakni adanya kegiatan atau aktifitas.



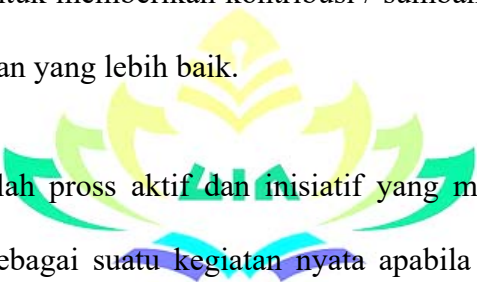
Davis (1962) mengatakan "*participation is define as mental and emotional envolepment of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them*". Maksudnya partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional seorang individu dalam situasi kelompok tertentu yang mendorongnya untuk mendukung atau menunjang tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta ikut bertanggung jawab terhadapnya.

Menurut Siagian (1985) bahwa partisipasi itu ada yang bersifat aktif dan

pasif. Partisipasi pasif dapat berarti bahwa dalam sikap perilaku dan tindakannya tidak melakukan hal – hal yang mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatan, dan partisipasi aktif berwujud :

Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga sosial dan politik yang ada di masyarakat sebagai saluran aspirasinya. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain, seperti kepada pimpinan baik yang sifatnya formal maupun informal. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang luas dan penting.

Mengacu pada pendapat tersebut, membuka kemungkinan bagi setiap anggota masyarakat untuk memberikan kontribusi / sumbangan demi terbina dan terwujudnya masa depan yang lebih baik.



Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi tiga faktor pendukungnya, yaitu : adanya kemauan, adanya kemampuan dan adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Lebih lanjut Soetrisno dalam Finna Rizqina (2010) menyatakan bahwa ada definisi yang beredar di masyarakat salah satunya adalah partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Menurut definisi ini ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dengan kemauan saja, tetapi juga dengan ada tidaknya hak untuk ikut menentukan arah dan tujuan program yang ada di wilayah mereka. Dengan demikian dari definisi tersebut dapat dirangkum indikator partisipasi masyarakat sebagai berikut :


- a) ikut serta mengajukan usul atau pendapat mengenai usaha-usaha yang akan dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga
- b) ikut serta bermusyawarah dalam pengambilan keputusan
- c) ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah termasuk dalam hal ini adalah memberikan sumbangan, baik berupa uang, tenaga atau material lainnya.
- d) ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan bersama
- e) ikut serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan program yang telah ditentukan bersama
- f) ikut serta menikmati dan memelihara hasil dari kegiatan tersebut.

Menurut Purwanto dan Supriyono dan Ahmad (2001) ada tiga jenis hubungan masyarakat yang dapat dikembangkan, yaitu a) hubungan edukatif, maksudnya adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik siswa, antara di lingkungan sekolah dan keluarga b) hubungan kultural, adalah usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat dimana sekolah itu berada c) hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah-sekolah dan instansi resmi

lainnya.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah merupakan satu bentuk desentralisasi yang langsung sampai ke ujung tombak pendidikan di lapangan. Jika kantor cabang dinas pendidikan kecamatan, dan dinas pendidikan kabupaten/kota lebih memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pembinaan, pengarahan, pemantauan dan penilaian, maka sekolah seharusnya diberikan peran nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Hal ini disebabkan karena proses interaksi edukatif di sekolah merupakan inti dari proses pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, bentuk desentralisasi pendidikan yang paling mendasar adalah yang dilaksanakan oleh sekolah dengan menggunakan Komite Sekolah sebagai wadah pemberdayaan peran serta masyarakat.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat dalam undang-undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam Kepmendiknas tersebut disebutkan bahwa peran yang harus diemban Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah: (1) sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan);

(2) *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan); (3) *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan); dan (4) mediator atau penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerja sama dengan orangtua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya, sangat diperlukan manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama. Dengan demikian, prinsip kemandirian dalam otonomi sekolah adalah kemandirian dalam nuansa kebersamaan. Hal ini merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip yang disebut sebagai *total quality management*, melalui suatu mekanisme yang menekankan pada mobilisasi kekuatan secara sinergis yang mengarah pada satu tujuan, yaitu peningkatan dan pengendalian mutu, serta kesesuaian pendidikan dengan pengembangan masyarakat.

Partisipasi masyarakat melalui komite sekolah adalah bentuk –bentuk partisipasi , keterlibatan atau dukungannya sebagai anggota masyarakat bersama sama pihak sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Hubungan antara sekolah dan masyarakat telah menjadi tuntutan yang harus dilakukan semua sekolah. Pada buku panduan penyelenggaraan pendidikan

berbasis luas dan berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup telah dinyatakan secara tegas bahwa sekolah harus memiliki kerjasama dengan masyarakat yang diwadahi dalam bentuk *komite sekolah*, dan pada tesis inipun partisipasi masyarakat lebih mengarah pada partisipasi dari pihak komite sekolah.

Komite sekolah memiliki kedudukan yang kuat, karena telah termaktup dalam UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, khususnya pasal 56 ayat (1),(2),(3) dan (4). Pasal 56 (3) menyebutkan bahwa komite sekolah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga , sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang peran komite sekolah telah banyak dilakukan oleh beberapa orang di Indonesia, salah satu contohnya,

Dalam tulisan Agus Timan, dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Sekolah Dasar (Studi Multi Kasus di SDN Pakunden 2, SDK Yos Sudarso, SDN Sananwetan 3, dan SDK Santa Maria Kota Blitar) dinyatakan bahwa Peran masyarakat melalui Komite Sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, Kepala Sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara

komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu sekolah yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien.

Kedua, Samuri. 630207009. Peran Komite Sekolah dalam Pengembangan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar Standar Nasional (Studi Kasus di SDN Pandean 1 Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali), Pembimbing I: Dr. Zaini Rohmad, MS. Pembimbing II: Dr. Sapja Anantanyu, SP, M.Si. Tesis: Program Studi Penyuluhan Pembangunan, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan (a) mendiskripsikan pemahaman peran Komite Sekolah dalam pengembangan kualitas pendidikan di SDN Pandean 1 Ngemplak, (b) mendiskripsikan peran Komite Sekolah dalam pengembangan kualitas Pendidikan di SDN Pandean 1 Ngemplak, (c) mendiskripsikan dampak peran Komite Sekolah dalam pengembangan kualitas pendidikan di SDN Pandean 1 Ngemplak

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan teknik *snowball sampling*. Analisa data menggunakan triangulasi sumber dan metode.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan sintesa tentang kaitan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang sudah dipaparkan. Berdasarkan teori yang sudah

dipaparkan tersebut, kemudian dianalisis secara sistematis dan kritis, sehingga menghasilkan sintesa tentang korelasi antara variabel yang akan diteliti.²⁴

Adapun variabel yang akan diteliti yaitu hubungan peran komite sekolah dan partisipasi masyarakat dengan mutu sekolah di Yayasan Nuurul Huda Lampung. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah peran komite sekolah dan partisipasi masyarakat

Dewan pendidikan Komite sekolah merupakan lembaga independent yang keberadaannya disekolah merupakan amanat yang telah tertuang dalam UU No 25 Tahun 2000 mempunyai tanggung jawab yang berat, mengingat perannya yang sangat besar, membutuhkan kewibawaan dan kepandaian dalam membuat langkah – langkah baru sebagai jawaban kebutuhan masyarakat. Peran utama komite sekolah yang tertuang dalam undang-undang adalah memberi pertimbangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan, Sebagai pendukung lain dari masyarakat, sebagai pengontrol mengawasi pelayanan pendidikan disekolah, sebagai mediator menindaklanjuti keluhan, saran dan kritik dari masyarakat.

Hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat berbeda pengertiannya dengan hubungan sekolah dengan wali murid. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat (Wali murid dan bukan wali murid). Peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah merupakan realisasi konkrit atas dasar konsep pendidikan yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (Alfa beta, Bandung, cet-10, 2010), h. 91.

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana komunikasi yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan peserta didik di sekolah. Dalam hal ini sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat.

Masyarakat adalah pihak yang bisa merasakan langsung dampak dari keberadaan suatu sekolah. Komite kita pahami merupakan lembaga independent yang dalam perannya menjembatani kepentingan pihak sekolah dengan masyarakat sekitar berasma kepala sekolah komite berperan besar dalam pengelolaan sebuah sekolah.

Mutu dalam konteks "hasil" pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, dapat pula prestasi bidang lain seperti olah raga, seni atau keterampilan tertentu (komputer, beragam jenis teknik, jasa). Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.

Kerangka pikir merupakan konsep yang memuat ketekaitan antara variable-variabel dalam penelitian sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang timbul. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ada tiga factor, yaitu peran Komite Sekolah dan masyarakat dengan mutu sekolah. Yang menjadi indikator Peran komite sekolah yaitu:

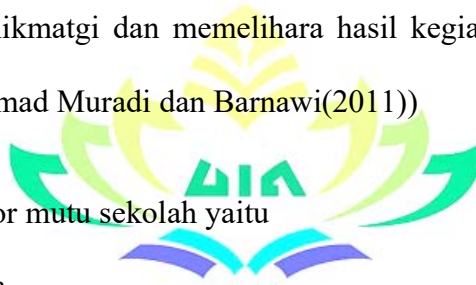
1. Memberi pertimbangan dalam menentukan kebijakan sekolah
2. Ikut serta dalam menggalang dana mmber lainnya dari masyarakat
3. Mengawasi jalannya pendidikan di sekolah
4. Memfasilitasi hubungan dalam kelompok atau organisasi. (Yuki. G. 2005)

Yang menjadi Indikator Prtisipasi Masyarakat yaitu:

1. Ikut serta mengajukan usul atau pendapat.
2. Ikut serta bermusyawarah mengambil keputusan.
3. Ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan
4. Ikut serta mengawasi pelaksnaan keputusan
5. Ikut bertanggung jawab terhadap hasil.
6. Ikut serta menikmati dan memelihara hasil kegiatan (Soetrisno, 1995 dalam Muhammad Muradi dan Barnawi(2011))

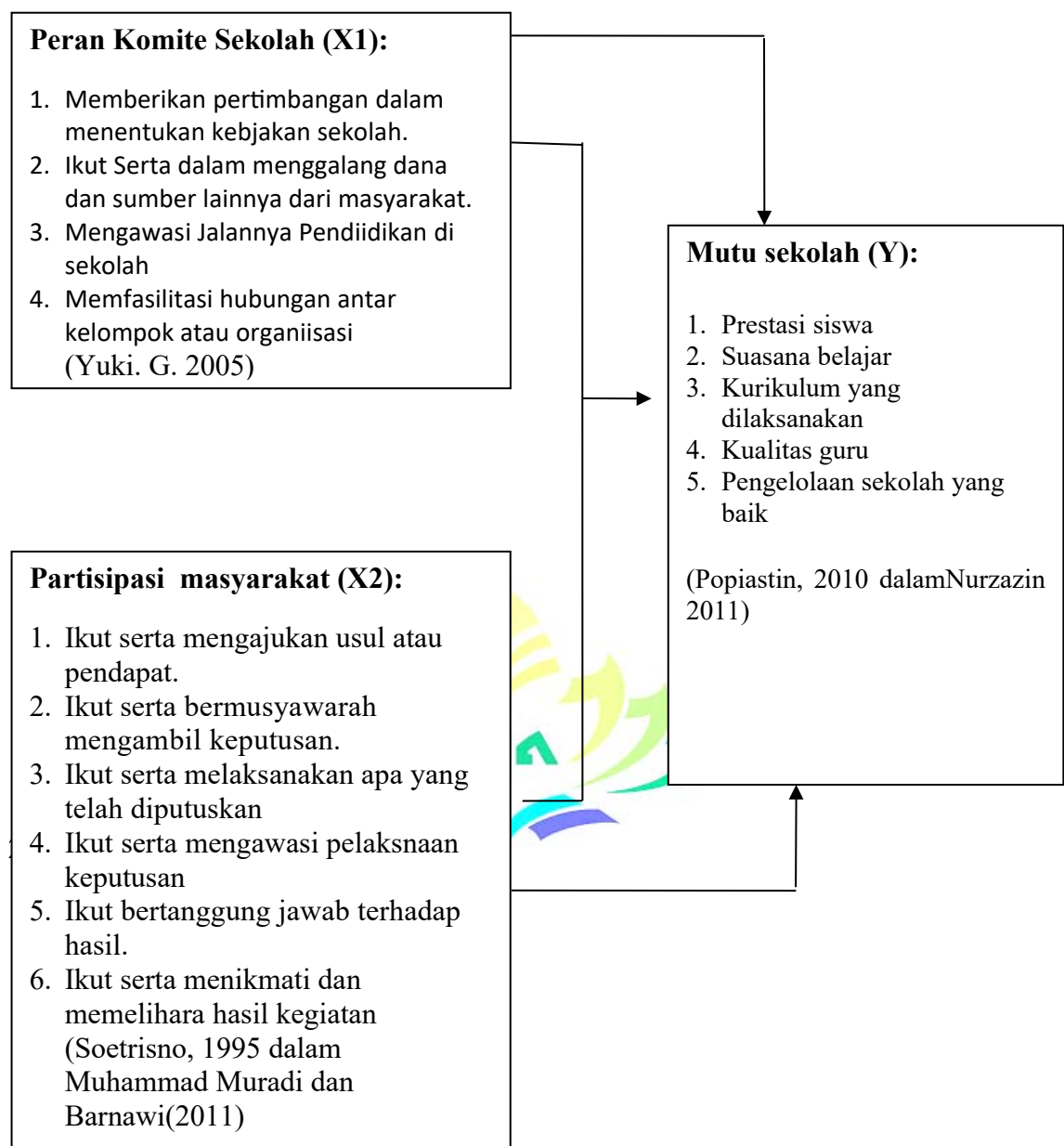
Yang menjadi indikator mutu sekolah yaitu

1. Prestasi siswa
2. Suasana belajar
3. Kurikulum yang dilaksanakan
4. Kualitas guru
5. Pengelolaan sekolah (Popiastin, 2010 dalamNurzazin 2011)



Dari beberapa faktor diatas diperoleh hubungan antara partisipasi masyarakat dan kepemimpinan kepala sekolah dengan peningkatan mutu sekolah, maka dapat dikemukakan dalam bentuk bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 3. Kerangka Pikir Hubungan Antar Variabel



Gambar 3. Kerangka pikir hubungan antar variabel

Dari kerangka teoritik di atas mendeskripsikan bahwa setiap indikator memiliki pokok bahasan yang berbeda. Terdapat hubungan konsistensi peran komite sekolah dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu sekolah. Dengan demikian, penelitian ini akan dibuktikan ada tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel bebas yakni komite sekolah dan partisipasi masyarakat dengan variabel terikat yakni mutu sekolah.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis bersumber dari kata *hypo* (belum tentu sah/benar) dan *tesis* (asumsi/kesimpulan). Hipotesis adalah jawaban sementara atas suatu pertanyaan penelitian.²⁵

Adapun hipotesis penelitian Hubungan Peran Komite Sekolah dan Partisipasi Masyarakat dengan Mutu Sekolah, yaitu:

- a. Terdapat Hubungan variabel Peran Komite Sekolah (X_1), terhadap variabel Mutu Sekolah (Y).
- b. Terdapat Hubungan variabel Partisipasi Masyarakat (X_2), terhadap variabel Mutu Sekolah (Y).
- c. Terdapat Hubungan secara simultan dari variabel Peran Komite Sekolah (X_1) dan variabel Partisipasi Masyarakat (X_2), terhadap variabel Mutu Sekolah (Y).

²⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 80